

*Peran Humas Pemerintah
dan Diseminasi Informasi
untuk Kesatuan Bangsa*

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

Guru Besar Hukum Tata Negara

Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Landasan Hukum

- **UU 1945, Pasal 28 F:** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi.
- **UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:** Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik

Tujuan UU KIP

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang benar
- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik: transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

Potret Humas Pemerintah

- Lamban
- Sangat birokratis
- Tidak responsif
- Tidak media friendly
- Hilang saat dibutuhkan
- Bekerja berdasar jam kerja (tidak fleksibel)
- Informasi menunggu dari atasan
- Infonya terkadang kurang akurat
- Cenderung membela diri, bahkan tertutup
- Sibuk dengan urusan administrasi dan protokoler, dll

Komitmen untuk Berubah

- Humas Pemerintah harus memiliki peran penting dalam melaksanakan amanah undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah berusia 5 tahun
- Agar berjalan efektif, Humas Pemerintah harus melakukan terlebih dahulu PERUBAHAN yang signifikan, baik dalam hal pemahaman tentang informasi publik, maupun dalam implementasi kegiatan kehumasan.

Paradigma Baru Humas Pemerintah

- Transparan, responsif, rajin mencari dan berbagi informasi dengan publik dan pers
- Menyediakan informasi dengan cepat dan akurat (meminimalkan jarak dengan nara sumber utama)
- Siap bekerja dengan waktu yang fleksibel (meladeni pers di luar jam kerja)
- Hadir setiap saat, terutama ketika terjadi krisis atau bila terjadi peristiwa penting

Transparansi dan Kecepatan (MK Periode 2008-2013)

- Informasi tentang persidangan bisa diakses secara terbuka dan tanpa biaya melalui Website MK
- Semua hasil dan keputusan sidang bisa diakses dengan cepat melalui website
- Pimpinan dan Juru Bicara MK terbuka dan selalu meladeni pertanyaan pers, baik pada jam kerja maupun di luar waktu kerja resmi
- Dalam praktik, banyak instansi yang digugat oleh LSM karena tertutup atas informasi yang dibutuhkan. Sidang kerap dilakukan di MK untuk pengadilan.

Outcome yang Diharapkan

- Dengan terbuka dan responsif terhadap publik dan pers, lembaga negara (badan publik) akan terdorong untuk memberikan PELAYANAN yang baik bagi warga negara.
- Dengan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi, maka warga negara merasa memiliki peran dan keterlibatan dalam proses pembangunan.

Sekian

- Terima kasih...